



**ASPEK SOSIAL EKONOMI PENANGKAPAN IKAN
DI PANGKALAN PENDARATAN IKAN (PPI) CELONG, KABUPATEN BATANG**

Social Economic Aspects of Capture Fisheries at Celong Fishing Port, Batang Regency

Shasa Chairunnisa, Azis Nur Bambang^{*)}, Faik Kurohman

Departemen Perikanan Tangkap, Jurusan Perikanan,
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Sudarto, SH, Tembalang, Semarang, Jawa Tengah – 50275, Telp/Fax. +6224 7474698
(email: shasa.chairunnisa@gmail.com)

ABSTRAK

Pengelolaan perikanan tangkap tidak dapat terlepas dari 3 aspek yaitu ekologi, ekonomi, dan sosial. Kondisi perikanan tangkap di Indonesia, khususnya di PPI Celong, dianggap masih belum dapat menyeimbangkan ketiga aspek tersebut. Maka dari itu dibutuhkan strategi agar usaha perikanan tangkap yang efisien secara ekonomi dan dapat diterima secara sosial. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis *Benefit Cost Ratio (BC Ratio)* usaha perikanan tangkap, serta persepsi, partisipasi, dan aspirasi nelayan terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 71/PERMEN-KP/2016. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus mengenai penangkapan ikan yang berkelanjutan di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Celong pada bulan Desember 2017 dengan wawancara dan observasi lapangan. Responden dipilih menggunakan metode *snowball sampling* dengan jumlah sampel 65 orang. Hasil analisis BC Rasio menghasilkan nilai 1,86 pada arad, 1,51 pada *trammel net*, dan 1,48 pada *gill net*. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah ketiga usaha perikanan tangkap di PPI Celong layak untuk dikembangkan dan sebagian besar nelayan tidak setuju terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 71/PERMEN-KP/2016 dan tidak merealisasikannya karena alat tangkap pengganti dari pemerintah dianggap kurang memadai.

Kata Kunci : Keberlanjutan, BC Rasio, Persepsi, Partisipasi, Aspirasi

ABSTRACT

Capture fisheries management can't be separated from 3 aspects, its ecology, economy, and social. The condition of capture fishery in Indonesia, especially at Celong Fishing Port, still can't balance these three aspects. Therefore an economically efficient and socially acceptable strategy is needed. The purpose of this research is to analyze the Benefit Cost Ratio (BC Ratio) of capture fishery business, and perception, participation, and aspiration of fishermen to the Minister of Marine and Fisheries No. 71/PERMEN-KP/2016. The research method used is case study on sustainability capture fisheries at Celong Fishing Port in December 2017 with interview and observation. Respondents were taken by snowball sampling method with a sample size of 65 people. The results of BC ratio analysis resulted in value 1.86 for arad, 1.51 for the trammel net, and 1.48 for gill net. The conclusions obtained from this research are three of capture fisheries business in PPI Celong feasible to be developed and most of the fishermen disagreed with the Minister of Marine and Fisheries No. 71/PERMEN-KP/2016 and did not realize it because the substitute fishing gear from the government was considered inadequate.

Keywords : Sustainability, BC Ratio, Perception, Participation, Aspiration

**) Penulis Penanggungjawab*

1. PENDAHULUAN

Kabupaten Batang terletak dibagian Utara Provinsi Jawa Tengah dan berada pada garis 6° 51' 46"LS - 007° 11' 47" LS dan 109° 40' 19"BT - 110° 03' 06" BT. Kabupaten Batang memiliki luas wilayah daratan sebesar 788.642 ha dan wilayah laut sebesar 24.955 ha. Luasnya wilayah laut tersebut menjadikan Batang berpotensi dalam pengembangan usaha perikanan. Kabupaten Batang memiliki empat buah pelabuhan perikanan yaitu PPP Klidang Lor, PPI Roban, PPI Celong, dan PPI Siklayu. Celong merupakan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) yang terletak di Desa Kedawung, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang. Berdasarkan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang rata-rata produksi perikanan tangkap di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Celong mencapai 184.775 kg dan nilai produksinya Rp. 2.384.717.300,-.

Salah satu isu pembangunan perikanan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia adalah bagaimana menyeimbangkan antara tujuan ekonomi, sosial dan keberlangsungan sumberdaya perikanan. Peningkatan jumlah penduduk yang memanfaatkan sumberdaya perikanan sebagai sumber mata pencaharian

untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi menyebabkan tingginya tekanan pemanfaatan sumberdaya perikanan. Maka dari itu dibutuhkan strategi yang tepat agar pengelolaan sumberdaya perikanan dapat efisien dan optimal secara ekonomi serta berkeadilan dan dapat diterima secara sosial budaya (Nababan *et al.*, 2008). Jumlah hasil tangkapan nelayan berperan penting terhadap pendapatan nelayan guna memenuhi kebutuhan rumah tangga nelayan tersebut. Besarnya pendapatan akan menentukan tingkat kesejahteraan nelayan. Nelayan sebagai pemeran utama dalam usaha perikanan seharusnya mendapatkan hak untuk hidup berkecukupan. Kajian mengenai kelayakan usaha perikanan penting dilakukan agar nelayan dapat mengetahui efisiensi tiap alat tangkap, sehingga nelayan dapat menentukan alat tangkap yang mereka butuhkan untuk menunjang kebutuhan hidup mereka.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 tahun 2016 menyatakan bahwa alat tangkap pukat hela dan pukat tarik dilarang untuk digunakan oleh nelayan di Indonesia. Namun pada kenyataannya banyak nelayan yang tidak mematuhi peraturan tersebut sehingga alat tangkap yang tidak ramah lingkungan masih sering digunakan hingga saat ini. Hal ini dikarenakan stok sumberdaya ikan yang semakin sedikit serta musim penangkapan yang tidak menentu membuat nelayan berlomba-lomba menangkap ikan dengan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan demi mendapatkan hasil tangkapan yang banyak. Jika aktivitas ini terus dilanjutkan, maka sumberdaya laut akan mengalami kerusakan serta semakin berkurangnya stok sumberdaya ikan. Selain itu, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.71 tahun 2016 masih menuai pro dan kontra sampai saat ini. Beberapa pihak yang merasa dirugikan, terutama nelayan, sering melakukan aksi sebagai tanda ketidaksetujuan mereka terhadap peraturan yang diberlakukan. Ketidaksetujuan tersebut terjadi karena perbedaan persepsi antara pemerintah dan nelayan. Maka dari itu peneliti ingin mengetahui persepsi, partisipasi, dan aspirasi nelayan terhadap peraturan mengenai pelarangan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, khususnya alat tangkap arad yang merupakan alat tangkap mayoritas di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Celong, Kabupaten Batang.

Penelitian ini mengkaji tentang kelayakan usaha perikanan tangkap serta persepsi, partisipasi, dan aspirasi nelayan di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Celong terhadap peraturan mengenai PerMen KP No. 71 tahun 2016 mengenai pelarangan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan sebagai salah satu upaya membantu memberikan informasi kepada pemerintah mengenai alat tangkap ramah lingkungan dan usaha perikanan yang layak di Batang. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis *Benefit Cost Ratio* pada tiap unit alat penangkapan ikan di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Celong, Kabupaten Batang dan mengetahui persepsi, partisipasi, dan aspirasi nelayan di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Celong, Kabupaten Batang terhadap pelarangan penggunaan alat penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan.

2. MATERI DAN METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada Desember 2017 di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Celong, Kabupaten Batang. Materi pada penelitian ini adalah usaha penangkapan ikan yang berada di PPI Celong yaitu Arad, *Trammel net* dan *Gill net*.

Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus mengenai usaha penangkapan ikan di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Celong, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang pada bulan Desember 2017. Metode studi kasus merupakan suatu penyelidikan intensif terhadap individu atau unit sosial secara detail (Kasmadi dan Nia, 2014). Metode pengambilan responden yang digunakan pada analisis ekonomi dan sosial adalah *snowball sampling* dengan jumlah total responden 65 orang. Menurut Umar (2003), *snowball sampling* adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian semakin membesar sampai memenuhi syarat populasi.

Analisis Kelayakan Usaha

Kajian aspek ekonomi dilakukan terhadap kelayakan usaha nelayan arad, *trammel net*, dan *gillnet*. Penelitian ini menggunakan analisis kelayakan usaha dengan umur proyek 10 tahun berdasarkan umur ekonomis kapal. Tingkat inflasi yang digunakan pada analisis ini adalah 3,61% sesuai dengan inflasi Bank Indonesia pada bulan Desember 2017. Kajian ini didasarkan pada data hasil wawancara dengan nelayan. Penelitian ini menggunakan analisis *Benefit Cost Ratio* (BC rasio) dengan cara menghitung perbandingan antara total manfaat yang didapatkan dengan total biaya yang dikeluarkan untuk menentukan kelayakan dari unit usaha perikanan tangkap. Semakin besar nilai BC Rasio, maka semakin besar keuntungan yang didapatkan pada usaha tersebut. Menurut Fauzi *et al.* (2011), rumus B/C rasio adalah sebagai berikut:

$$B/C \text{ Rasio} = \frac{\sum_{t=1}^n \frac{(B_t - C_t)}{(1+i)^t} (B_t - C_t) > 0}{\sum_{t=1}^n \frac{(C_t - B_t)}{(1+i)^t} (B_t - C_t) < 0}$$



Keterangan:

Bt = Penerimaan (*benefit*) pada tahun ke-t

Ct = Biaya (*cost*) pada tahun ke-t

i = Suku bunga

t = 1,2,3,...n

n = umur ekonomis

dengan kriteria:

Jika BC rasio > 1 : usaha untung atau layak dikembangkan

Jika BC rasio < 1 : usaha rugi atau tidak layak dikembangkan

Jika BC rasio = 1 : usaha pada titik impas (*Break event point*)

Jumlah responden yang diambil adalah sebanyak 65 nelayan yang terdiri dari 30 orang nelayan arad, 25 orang nelayan *trammel net* dan 10 orang nelayan *gill net*. Responden pada nelayan *trammel net* dan *gill net* diambil secara keseluruhan karena jumlahnya yang kurang dari 30. Sedangkan nelayan arad diambil 30 orang sebagai sampel. Menurut Roscoe dalam Halim dan Ishak (2014), ketika sampel dipecah menjadi sub sampel maka ukuran sampel minimal untuk tiap kategori sebanyak 30 adalah tepat.

Analisis Sosial

Nelayan tergolong dalam masyarakat menengah kebawah dengan tingkat pendidikan yang rendah. Keterbatasan tersebut membuat nelayan sulit dalam mencari alternatif pekerjaan. Kondisi ini dapat menyebabkan nelayan menggunakan alat tangkap yang merusak lingkungan (destruktif) dalam mencari ikan agar hasil tangkapan yang didapatkan banyak. Padahal telah diberlakukan peraturan pelarangan penggunaan alat tangkap yang destruktif, terutama pukat hela dan pukat tarik yang sedang ramai diperbincangkan saat ini. Maka dari itu perlu dilakukan wawancara mengenai persepsi, partisipasi, dan aspirasi nelayan dalam penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Celong, untuk mengetahui tindakan nelayan dalam menjaga kelestarian lingkungan serta partisipasi nelayan terhadap peraturan yang diberlakukan. Nelayan yang menjadi responden adalah nelayan arad, *trammel net*, dan *gill net* dengan jumlah responden 65 orang yang terdiri dari 30 orang nelayan arad, 25 orang nelayan *trammel net* dan 10 orang nelayan *gill net*. Menurut Roscoe dalam Halim dan Ishak (2014), ketika sampel dipecah menjadi sub sampel maka ukuran sampel minimal untuk tiap kategori sebanyak 30 adalah tepat.

Kajian ini membahas mengenai persepsi, partisipasi dan aspirasi nelayan di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Celong terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 71 tahun 2016 mengenai jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP RI). Peraturan tersebut salah satunya berisi tentang pelarangan penggunaan arad di seluruh WPP RI, sehingga peneliti melakukan penelitian mengenai pendapat nelayan, peran serta nelayan dalam penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan, serta harapan nelayan kepada pemerintah dengan adanya kebijakan tersebut. Penelitian ini dilakukan karena sebagian besar nelayan di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Celong masih menggunakan alat penangkapan ikan yang dilarang, yaitu Arad.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kelayakan Usaha

Analisis kelayakan pada suatu usaha sangat diperlukan untuk mengetahui seberapa layak usaha tersebut dalam jangka waktu tertentu. Salah satu metode yang sering digunakan untuk mengetahui kelayakan usaha adalah *Benefit Cost Ratio* (B/C Ratio). Menurut Arfiati *et al.* (2015), *Cost Benefit Analysis* (CBA) merupakan metode pembuatan daftar prioritas yang paling efektif dilakukan. CBA merupakan alat pembuat keputusan untuk mengevaluasi dan membandingkan kebijakan dengan sistematis. Perhitungan BC Rasio pada penelitian ini adalah dengan membandingkan antara manfaat yang didapatkan pada suatu unit usaha perikanan dengan total biaya yang dikeluarkan. Pada perhitungan ini ditentukan tingkat inflasi sebesar 3,61 berdasarkan tingkat inflasi Bank Indonesia pada bulan Desember 2017. Menurut Fauzi *et al.* (2011), kegiatan perikanan layak dikembangkan lanjut bila mempunyai nilai B/C Ratio lebih dari 1.

Data yang dibutuhkan dalam perhitungan *Benefit Cost Ratio* ini adalah penerimaan, nilai investasi dan umur ekonomis dari alat tangkap, kapal, mesin, garden. Selain itu dibutuhkan pula biaya perawatan dan biaya variabel seperti biaya perbekalan dan biaya retribusi lelang. Menurut Papilaya *et al.* (2011), elemen pengukuran yang perlu diidentifikasi dalam analisis BC Rasio ini mengacu kepada kebutuhan analisis finansial dari pengoperasian armada atau usaha perikanan sehingga dapat diketahui rasio *benefit cost*-nya. Adapun elemen tersebut adalah investasi, biaya operasi, penerimaan, umur poyek (umur ekonomis), suku bunga yang berlaku pada setiap periode selama umur proyek, dan keuntungan usaha. Hasil perhitungan nilai B/C Rasio pada masing-masing unit usaha penangkapan tersaji pada tabel 1.



Tabel 1. Kelayakan usaha perikanan di PPI Celong berdasarkan B/C Rasio

Usaha Perikanan	Nilai B/C	Keterangan
Arad	1,86	Layak
<i>Trammel Net</i>	1,51	Layak
<i>Gill Net</i>	1,48	Layak

Sumber : Hasil Penelitian, 2018.

Berdasarkan Tabel 1, usaha perikanan arad, *trammel net*, dan *gill net* memiliki nilai B/C Rasio lebih dari 1 yang artinya setiap Rp. 1,00,- biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan usaha arad, maka akan mendapatkan penerimaan sebesar Rp. 1.86,- satuan. Hal yang sama juga berlaku untuk *trammel net* dan *gill net*, dimana setiap Rp. 1.00,- biaya yang dikeluarkan, maka akan mendapatkan penerimaan masing-masing Rp. 1.51,- dan Rp. 1.48,-. Nilai tersebut didapat dari total keseluruhan penerimaan selama usaha itu berlangsung yakni 10 tahun dibagi dengan jumlah total biaya selama 10 tahun. Perbedaan ketiga nilai tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu jumlah tenaga kerja, jenis pengoperasian alat tangkap, perbekalan, lama waktu penangkapan, dan pengalaman nelayan.

Salah satu faktor yang mempengaruhi pendapatan nelayan adalah musim. Pada saat penelitian berlangsung, sering kali nelayan tidak melaut akibat gelombang yang cukup besar pada bulan Desember 2017. Bahkan sebagian kapal nelayan ada yang hancur diterjang ombak. Menurut Bandiyono *et al.* (2010), Sebagaimana yang terjadi selama ini musim gelombang kuat merupakan musim yang kurang bersahabat bagi nelayan karena banyak nelayan yang tidak dapat melaut sehingga tidak mendapatkan ikan. Sebagian nelayan mempunyai pekerjaan sampingan pada waktu musim gelombang kuat, sedangkan nelayan yang tidak mempunyai pekerjaan sampingan melakukan persiapan seperti perbaikan alat tangkap.

Berdasarkan ketiga nilai BC Rasio tersebut, dapat diketahui bahwa semua alat penangkapan ikan yang berada di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Celong layak untuk dijalankan. Ketiga alat tangkap tersebut dikatakan layak karena memiliki nilai BC Rasio lebih dari 1 (>1). Nilai BC Rasio ketiga alat tangkap ini menunjukkan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Celong memiliki produktivitas perikanan yang baik. Menurut Ramadhan *et al.* (2016), *Benefit Cost Ratio* (B/C) digunakan sebagai penilaian kelayakan finansial, yaitu apabila B/C ratio lebih besar dari 1, maka proyek layak atau dapat dilaksanakan. Jika B/C Ratio sama dengan 1, maka proyek impas.

Setelah mendapatkan nilai BC Rasio, selanjutnya ketiga nilai tersebut dapat dibandingkan untuk mengetahui alat tangkap yang paling menguntungkan pada waktu yang akan datang. Menurut Pabilaya *et al.* (2011), nilai BCR juga memberi gambaran tentang jenis armada (usaha perikanan) yang paling layak untuk dikembangkan di masa yang akan datang. Jika ketiga usaha perikanan tersebut dibandingkan, maka kelayakan usaha arad memiliki nilai yang paling tinggi sehingga arad dapat dianggap sebagai alat tangkap yang paling menguntungkan di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Celong. Hal ini terjadi karena arad dioperasikan dengan cara menyeret dasar perairan dan menangkap seluruh biota yang dilewatinya atau dapat dikatakan bahwa arad kurang selektif, sehingga selalu menghasilkan tangkapan yang lebih banyak dibanding *gill net* dan *trammel net*. Menurut Restumurti *et al.* (2016), lebih banyak nelayan menggunakan Arad karena alat tangkap ini sangat menguntungkan nelayan. Arad membuat nelayan bisa mendapatkan hasil tangkapan ikan dari dasar perairan sampai permukaan, sehingga mendapatkan hasil tangkapan yang lebih banyak.

Berdasarkan hasil perhitungan, arad memiliki nilai B/C Rasio yang paling tinggi, namun penggunaan alat tangkap ini dilarang dioperasikan di seluruh Indonesia oleh pemerintah karena dianggap tidak ramah lingkungan. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 71 tahun 2016 mengenai jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Namun, sampai saat ini alat tangkap arad masih rutin digunakan oleh nelayan Celong karena mereka lebih mengutamakan besarnya *benefit* atau penerimaan yang diperoleh dari operasional usaha tersebut, tanpa memperhatikan kerusakan yang disebabkan.

Gill net dan *trammel net* sebagai alat tangkap yang menguntungkan dan ramah lingkungan diharapkan dapat menggantikan alat tangkap arad agar kelestarian laut tetap terjaga. Maka dari itu dibutuhkan upaya lebih dari pemerintah dalam mengubah pandangan masyarakat pesisir terhadap alat tangkap yang ramah lingkungan, agar mereka dapat segera berpindah menggunakan alat tangkap yang aman bagi ekosistem. Sering sekali sosialisasi yang diberikan pemerintah tidak dipahami dan tidak direalisasikan oleh nelayan, hal ini mungkin terjadi karena pemberdayaan masyarakat kurang memahami keadaan nelayan. Menurut Kusnadi (2011), sebagai sebuah entitas sosial, masyarakat nelayan memiliki sistem sosial, ekonomi, dan budaya yang berbeda dengan masyarakat lain. Upaya memahami nelayan dapat dilakukan dengan cara memetakan secara komprehensif sistem sosial, ekonomi, dan budaya mereka. Pemahaman terhadap unsur-unsur kehidupan masyarakat nelayan ini sangat berguna sebagai modal pengetahuan bagi para pemberdayaan masyarakat, sehingga memberikan kontribusi dalam menetapkan langkah-langkah pemberdayaan yang efektif.

Analisis Persepsi, Partisipasi, dan Aspirasi Nelayan terhadap PerMen No. 71 tahun 2016

Alat tangkap ramah lingkungan merupakan alat penangkapan ikan yang tidak merusak ekosistem laut dan aman bagi sumberdaya. Penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan ini perlu dilakukan dan dilaksanakan secara konsisten agar sumberdaya laut tetap lestari di kemudian hari. Beberapa cara sudah dilakukan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk menjaga sumberdaya laut. Salah satunya adalah pelarangan penggunaan beberapa jenis alat tangkap seperti pukat hela (*trawls*) dan pukat tarik (*seine nets*) yang tertuang dalam PerMen KP No. 71 tahun 2016. Namun sampai saat ini pergantian alat tangkap ramah lingkungan masih menuai pro dan kontra dari berbagai pihak. Maka dari itu peran serta masyarakat dalam penentuan kebijakan harus diikutsertakan agar kebijakan tersebut dapat dijalankan dengan baik. Persepsi nelayan di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Celong terhadap PerMen KP No. 71 tahun 2016 disajikan pada tabel 2.

Tabel 2. Persepsi Nelayan terhadap PerMen KP No. 71 tahun 2016

Kategori	Arad	Trammel net	Gill net	Total
Setuju	4	11	9	37%
Tidak setuju	26	14	1	63%

Sumber: Hasil Penelitian, 2018.

Berdasarkan wawancara dengan nelayan mengenai persepsi mereka terhadap pelarangan arad, dapat diketahui bahwa 37% responden setuju dan 63% tidak setuju mengenai pelarangan alat tangkap arad. Pernyataan tidak setuju sebagian besar disampaikan oleh nelayan arad. Mereka berpendapat bahwa arad merupakan alat tangkap yang paling menguntungkan di Celong karena dapat menghasilkan tangkapan yang lebih banyak dalam satu kali trip jika dibandingkan dengan dua alat tangkap lainnya, yaitu *gill net* dan *trammel net*. Beberapa diantaranya juga berpendapat bahwa hanya dengan alat tangkap arad, kebutuhan keluarga mereka dapat terpenuhi dan anak-anak mereka dapat bersekolah bahkan hingga menempuh bangku kuliah. Namun, hal ini berbeda dengan pendapat nelayan *gill net* dan *trammel net* yang sebagian besar setuju terhadap pelarangan arad. Mereka berpendapat bahwa menjaga kelestarian lingkungan sangat penting untuk keberlanjutan di masa depan. Mereka merasa hasil tangkapan yang didapatkan dari operasi penangkapan *gill net* dan *trammel net* sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga tidak perlu menggunakan alat tangkap arad yang merusak lingkungan. Persepsi yang berbeda dari tiap nelayan tentunya berdampak pada peran serta mereka dalam menjalankan kebijakan tersebut. Partisipasi nelayan di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Celong terhadap PerMen KP No. 71 tahun 2016 disajikan pada tabel 3.

Tabel 3. Partisipasi Nelayan dalam Penggunaan API Ramah Lingkungan

Kategori	Arad	Trammel net	Gillnet	Total
1. Peran serta dalam penggunaan API yang ramah lingkungan				
Ya	0	10	10	31%
Tidak	30	15	0	69%

Sumber: Hasil Penelitian, 2018.

Peraturan pemerintah mengenai pelarangan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan tentunya bertujuan untuk menjaga kelestarian sumberdaya laut. Maka dari itu partisipasi nelayan dalam ikut serta menjaga lingkungan laut sangat dibutuhkan karena nelayan merupakan pihak yang paling sering melakukan aktifitas di laut. Partisipasi nelayan terhadap kelestarian laut dapat dilihat dari alat tangkap yang digunakan. Berdasarkan hasil wawancara, sebanyak 69% responden masih menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, yaitu arad. Padahal pemerintah selalu melakukan sosialisasi mengenai pengelolaan sumberdaya laut yang diikuti oleh nelayan Celong. Berdasarkan hal tersebut maka dapat diketahui bahwa kesadaran nelayan dalam menjaga kelestarian lingkungan masih kurang. Hal ini dapat dipengaruhi oleh perbedaan pendapat antara pemerintah dan nelayan mengenai alat tangkap arad. Maka dari itu dibutuhkan aspirasi dari nelayan sebagai masukan untuk pemerintah dalam menentukan suatu kebijakan. Aspirasi nelayan di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Celong terhadap PerMen KP No. 71 tahun 2016 disajikan pada tabel 4.

Tabel 4. Aspirasi Nelayan terhadap PerMen KP No.71 tahun 2016

Kategori	Arad	Trammel net	Gillnet	Total
1. Pemberian alat tangkap pengganti yang memadai.	16	9	0	38%
2. Tinjauan ulang	7	3	1	17%
3. Kepastian tanggal pelarangan	7	4	0	17%
4. Secepatnya dilarang karena merusak lingkungan laut	0	7	6	20%
5. Secepatnya dilarang agar ikan kecil cepat membesar	0	3	3	9%

Sumber: Hasil Penelitian, 2018.



Proses pembuatan sebaiknya disosialisasikan dan melibatkan *stake holder* yang ada di masyarakat. Sehingga ketika kebijakan tersebut dikeluarkan, tidak menimbulkan pro dan kontra. Hal ini pun terjadi pada kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ketika mengeluarkan PerMen KP No. 71 tahun 2016. Banyak terjadi pro dan kontra dari nelayan mengenai kebijakan tersebut. Nelayan yang merasa dirugikan melakukan unjuk rasa bersama-sama sebagai tanda ketidaksetujuannya terhadap peraturan yang ditetapkan tersebut. Maka dari itu, sebaiknya pemerintah melakukan diskusi terlebih dahulu dengan masyarakat sebelum menentukan suatu kebijakan. Berdasarkan wawancara dengan nelayan di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Celong, sebagian besar nelayan tidak menyetujui PerMen KP No. 71 tahun 2016 karena dianggap merugikan nelayan. Selain itu alat tangkap pengganti yang diberikan oleh pemerintah dianggap kurang memadai oleh nelayan. Alat tangkap pengganti yang ditawarkan cukup bervariasi, namun kuantitas yang diberikan oleh pemerintah dianggap tidak cukup. Contohnya adalah *gill net millennium* yang banyak dipilih oleh nelayan sebagai alat tangkap pengganti arad hanya diberikan sepanjang 500 m oleh pemerintah. Nelayan arad merasa dirugikan karena jumlah hasil tangkapan yang dihasilkan sangat jauh dari hasil tangkapan arad, sehingga nelayan Celong balik lagi menggunakan arad sebagai alat tangkap sehari-hari. Hal ini berbeda dengan pendapat nelayan *gill net* yang sebagian besar ingin agar alat tangkap arad secepatnya dilarang karena telah merusak lingkungan. Maka dari itu dibutuhkan program pemberdayaan masyarakat pesisir.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Nilai BC Rasio tiap alat tangkap yaitu arad sebesar 1,86, *trammel net* sebesar 1,51 dan *gill net* sebesar 1,48 yang menunjukkan bahwa ketiga usaha perikanan tangkap di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Celong layak dijalankan (BC Rasio > 1). Arad memiliki skor yang paling tinggi karena hasil tangkapan yang didapatkan lebih banyak dibandingkan *trammel net* dan *gill net*;
2. Sebagian besar nelayan di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Celong tidak setuju terhadap PerMen KP No.71 tahun 2016 dan tidak merealisasikannya karena alat tangkap pengganti dari pemerintah dianggap kurang memadai.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada orang tua yang telah memberikan dukungan moral dan materil serta dosen pembimbing yang telah membantu dalam penyusunan naskah. Terima kasih juga kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang, Ketua kelompok nelayan, Ketua TPI Celong, dan nelayan di PPI Celong yang telah membantu dalam proses penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfiati, D., Ika L.H., dan Nuriyani. 2015. Pengelolaan Sumberdaya Ikan di Perairan Umum. Penerbit Gunung Samudera, Malang, 64 hlm.
- Bandiyono, S., Ngadi, dan Sudiyono. 2010. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Lokas COREMAP II, Desa Sikakap, Kabupaten Mentawai. Pusat Penelitian Kependudukan, Jakarta, 121 hlm.
- Fauzi, S., B.H. Iskandar, B. Murdiyanto, dan E.S. Wiyono. 2011. Kelayakan Finansial Usaha Perikanan Tangkap di Selat Bali. *Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan*. 1(2): 37-46.
- Halim dan Ishak. 2014. *Post Election Behaviour? Is it Possible? A Framework Based on Hirschman (1970) Model*. *Australian Journal of Basic and Applied Sciences.*, 8(12): 67-75.
- Kasmadi dan S.S. Nia. 2014. Panduan Modern Penelitian Kuantitatif. Penerbit Alfabeta, Bandung, 234 hlm.
- Kusnadi. 2011. Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir. Ar-Ruzz Media, Jogjakarta, 164 hlm.
- Nababan, B.O., Sari Y.D., dan M. Hermawan. 2008. Tinjauan Aspek Ekonomi Keberlanjutan Perikanan Skala Kecil di Kabupaten Tegal Jawa Tengah. *Buletin Ekonomi Perikanan.*, 8(2): 50-68.
- Papilaya, M.J., M.F.A. Sondita, D.R.O. Monintja, dan V.P. Nikijuluw. 2011. Kelayakan Pengembangan Usaha Perikanan di Desa Pesisir Kota Ambon. *Jurnal Manajemen Sumberdaya Perairan.*, 7(2): 20-31.
- Ramadhan, H., Wijawanto D., dan Pramonowibowo. 2016. Analisis Teknis dan Ekonomis Perikanan Tangkap Bagan Perahu (*Boat Lift Net*) di Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak, Kabupaten Demak. *Journal of Fisheries Resources Utilization Management and Technology.*, 5(1): 170-177.
- Restumurti, D., A.N. Bambang, D.A.N.N. Dewi. 2016. Analisis Pendapatan Nelayan Alat Tangkap *Mini Purse Seine* 9 GT dan 16 GT di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Morodemak, Demak. *Journal of Fisheries Resources Utilization Management and Technology.*, 5(1): 78-86.
- Umar, H. 2003. Metode Riset Bisnis: Panduan Mahasiswa untuk Melaksanakan Riset Dilengkapi Contoh Proposal dan Hasil Riset Bidang Manajemen dan Akuntansi. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 336 hlm.